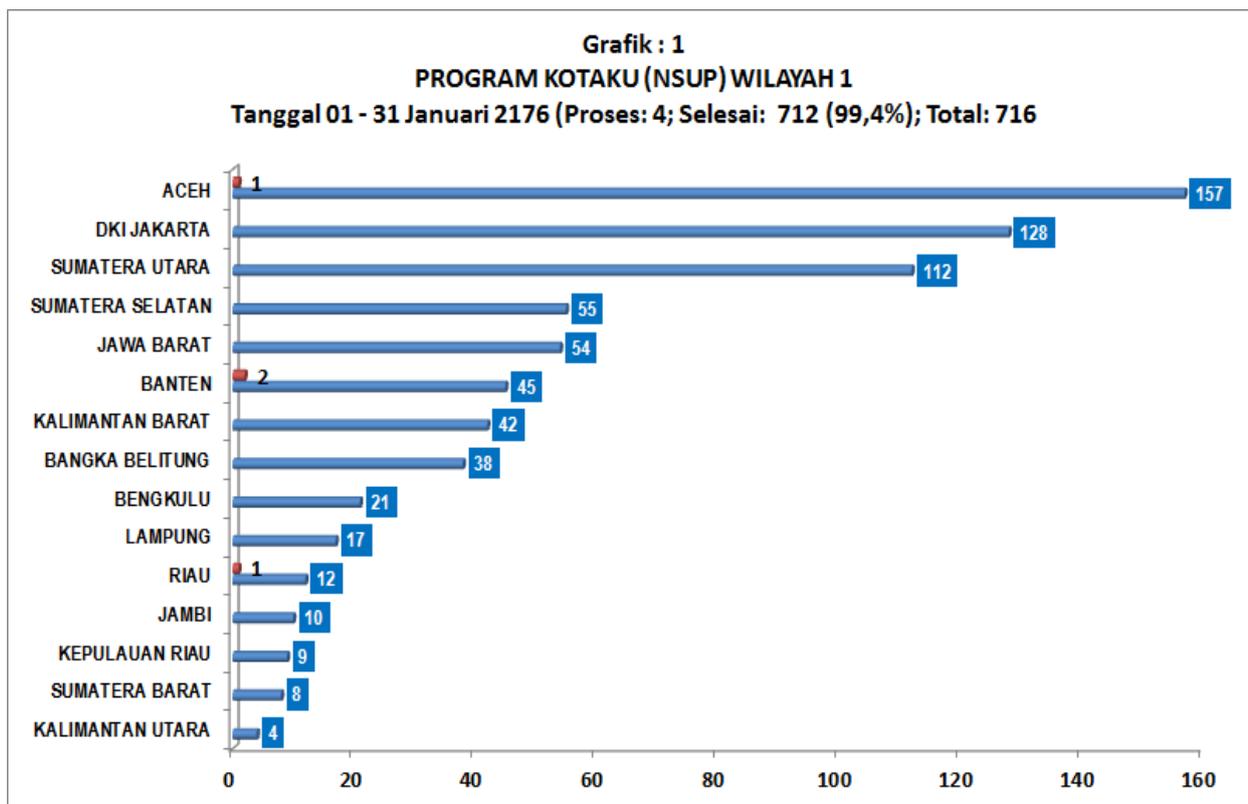


## Perkembangan PPM bulan Januari 2017

Pengelolaan pengaduan pada bulan Januari 2017 telah dikelola mencapai 716 pengaduan, dengan status penanganan telah selesai 712 atau 99,4 % dan status dalam proses 4 pengaduan atau (0,36%). Pengaduan yang tertinggi pada bulan ini terjadi di Provinsi Aceh sebanyak 157 pengaduan, sedangkan terendah di provinsi Kalimantan Utara sebanyak 4 pengaduan.

**Grafik 1. Capaian Pengaduan Tiap Provinsi**

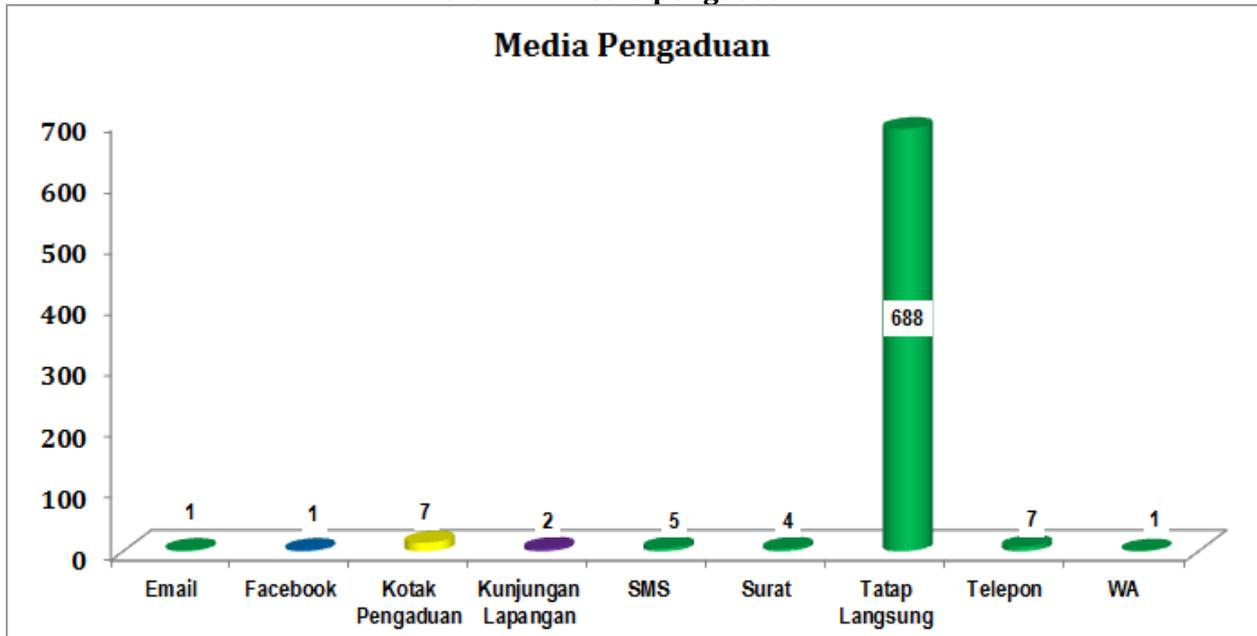


Berdasarkan lingkungnya, pengaduan administratif sebanyak 650 pengaduan (90,8%), masih dalam status proses 4 pengaduan. Pengaduan pada lingkup keuangan terdapat 66 pengaduan (9,2%) dan tidak ada status proses.

### 1) Pengaduan berdasarkan Media

Berdasarkan media pengaduan yang paling dominan di bulan Januari 2017 ada pada media tatap langsung 688 pengaduan (96,1%). Media pengaduan terendah melalui facebook, Whataapp dan email masing hanya 1 pengaduan (0,1%). Media kunjungan lapangan/supervisi 4 kasus ditemukan di Provinsi Jambi. Media Kotak pengaduan terjadi di Provinsi Sumatera Selatan 5 pengaduan, serta Provinsi Aceh dan di Riau masing-masing 1 pengaduan. Sedangkan media telepon digunakan untuk menyampaikan 7 pengaduan di Prov Sumatera Barat dan Lampung masing-masing 3 pengaduan, dan 1 pengadun di Prov DKI Jakarta.

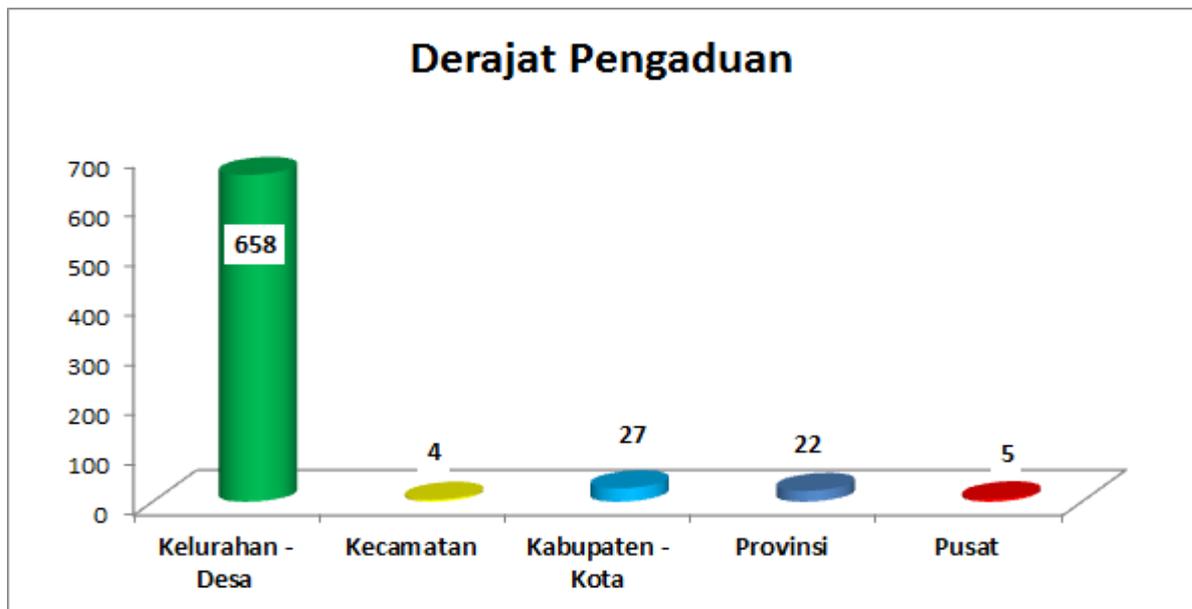
Grafik 4. Media pengaduan



## 2) Pengaduan berdasarkan derajat aduan

Pengaduan berdasarkan derajat aduan bahwa kasus/ pengaduan lebih banyak pada derajat tingkat kelurahan/desa. Derajat kelurahan/ desa mencapai 658 kasus (91,9%) dan pengaduan yang terendah pada tingkat kecamatan 4 pengaduan (0,6%).

Grafik 3. Pengaduan berdasarkan derajat aduan



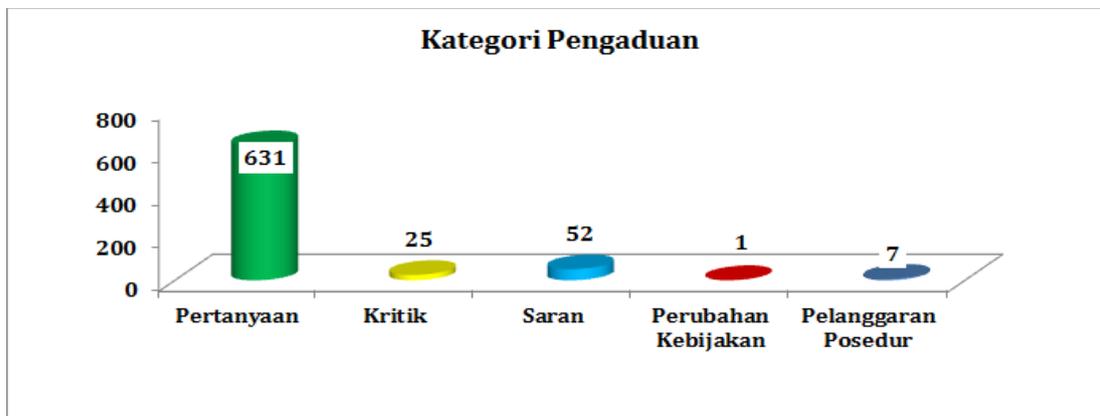
Derajat pengaduan tingkat kota/kabupaten dari 27 kasus atau 3,8%, terbanyak kasus terdapat di DKI Jakarta 9 kasus, dan di Jawa barat 6 kasus.

Derajat pengaduan penyelesaian pada tingkat kecamatan terdapat 4 kasus, di Provinsi DKI Jakarta 3 kasus dan 1 kasus di Sumatera Utara. Sedangkan derajat pengaduan tingkat provinsi terdapat 22 kasus, di DKI Jakarta 20 kasus, provinsi Banten dan Kalimantan Utara masing-masing 1 kasus. Untuk derajat pengaduan tingkat pusat, terdapat 5 kasus, Provinsi Banten 2 kasus dan 3 kasus Provinsi Riau.

### 3) Pengaduan berdasarkan kategori

Berdasarkan kategori pengaduan, kategori tertinggi adalah pertanyaan dengan jumlah mencapai 631 aduan atau 88,1%. Kategori saran 43 aduan, kritik 25 aduan, pelanggaran prosedur 7 aduan dan perubahan kebijakan 4 aduan, dan kategori lainnya tidak ada aduan.

Grafik 4. Pengaduan Berdasarkan Kategori



Pengaduan berdasarkan kategori yang tertinggi pada kategori pertanyaan 631 (88,1%). Pengaduan yang sedikit terdapat pada kategori perubahan kebijakan sebanyak 1 pengaduan (0,1%). Kasus pertanyaan terbanyak terdapat di Provinsi Aceh sebanyak 158 kasus (25,4%) dan kasus pertanyaan paling sedikit terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 3 kasus (0,5%).

Kategori saran tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta Sumatera utara 11 kasus (45,6%) dan pengaduan yang terendah terdapat di provinsi Sumatera Selatan dan Lampung masing-masing 1 kasus (4,3%).

Kategori kritik terbanyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta 17 kasus (32,7%), dan kritik terendah di Provinsi yang sama sekali tidak ada pengaduan kritik. Sedangkan pelanggaran prosedur terdapat 7 aduan, 6 diantaranya atau 85,7% di provinsi Jawa Barat. Untuk pengaduan perubahan kebijakan terdapat 1 kasus di Provinsi Kepulauan Riau.

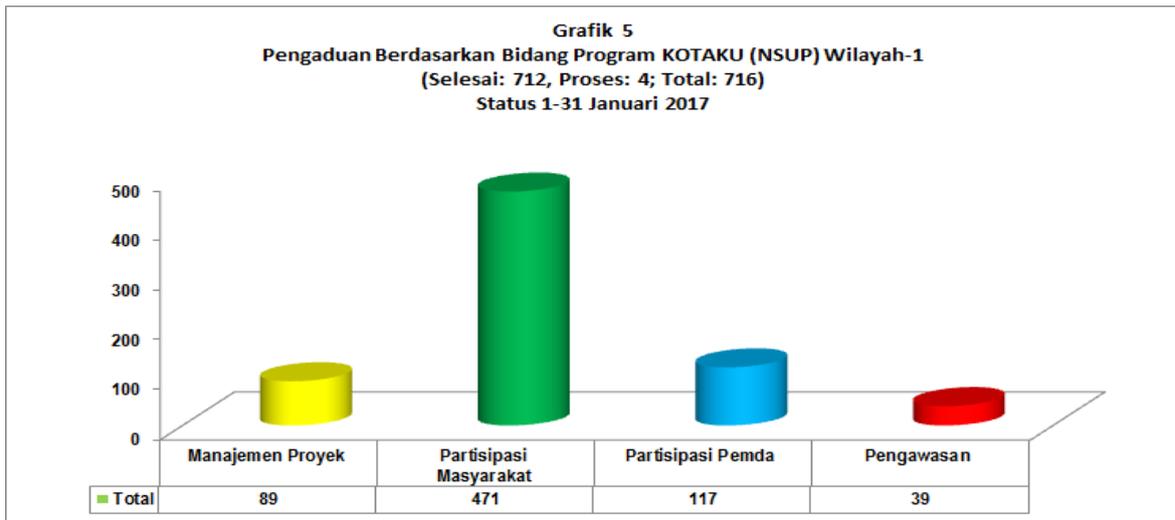
### 4) Pengaduan berdasarkan Bidang Pelaksanaan

Berdasarkan bidang kegiatan partisipasi masyarakat lebih dominan mencapai 471 aduan (65,8%). Sedangkan bidang pelaksanaan kegiatan yang kasusnya terendah pada kategori pengawasan 39 kasus (5,4%).

Bidang kegiatan Manajemen Proyek paling dominan terjadi pada Provinsi DKI Jakarta 25 kasus (28,1%). Sedangkan Sumatera Barat dan Bengkulu tidak ada pengaduan terkait manajemen proyek. Bidang kegiatan partisipasi masyarakat paling dominan terjadi pada Provinsi Aceh sebanyak 112 kasus (23,8%) dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 kasus (0,2%).

Sedangkan bidang kegiatan yang melibatkan partisipasi pemda paling tinggi terdapat di paling dominan terjadi pada Provinsi Sumatera Utara sebanyak 30 kasus (25,6%) dan terendah di Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi tidak ada pengaduan (0%). Pada pelaksanaan pengawasan tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 11 kasus (28,2%) dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jawa Barat, Lampung, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara tidak ada pengaduan (0%).

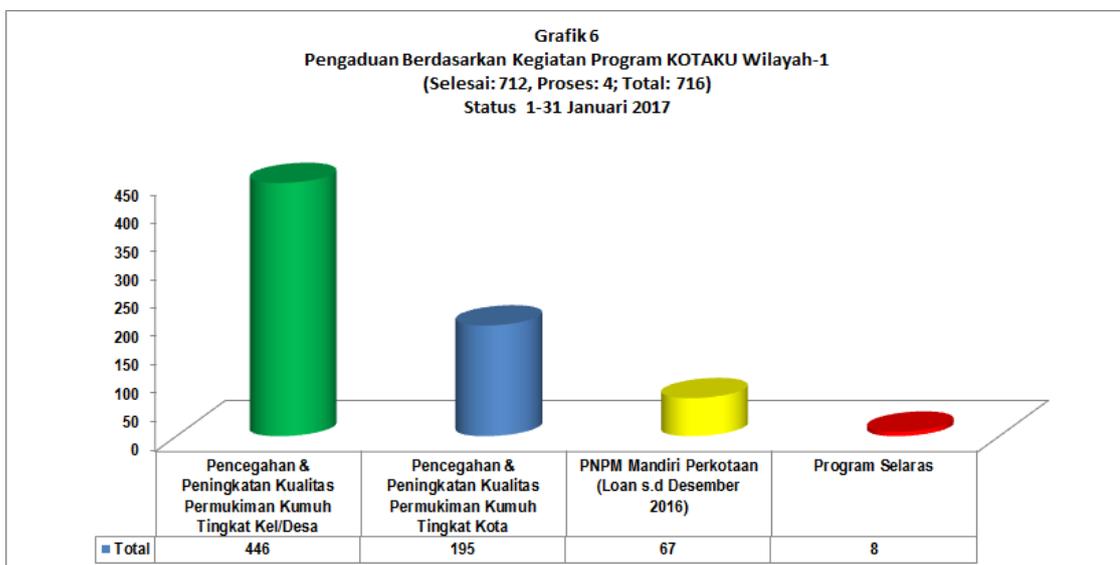
**Grafik 5. Pengaduan Berdasarkan Bidang Kegiatan**



**5) Pengaduan berdasarkan Program kegiatan**

Pada periode bulan Januari 2017, pengaduan yang berkaitan dengan program kegiatan berdasarkan skala tingkat kelurahan lebih tinggi sebanyak 446 pengaduan (62,3%). pengaduan yang berkaitan dengan program kegiatan berdasarkan skala tingkat kota/kabupaten mencapai 195 pengaduan atau sebesar 27,2%. Sementara pengaduan yang berkaitan dengan program KOTAKU Eks. Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan 67 kasus (9,4%) dan Program Selaras Aceh sebanyak 8 pengaduan atau 1,1%

**Grafik 6. Pengaduan Berdasarkan Program**



Pengaduan terkait program kegiatan skala tingkat kelurahan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta masing-masing 91 kasus (20,4%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 1 kasus (0,2%). Berdasarkan skala kota yang tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara 48 kasus (24,6%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Bengkulu tidak ada kasus (0%). Sedangkan berdasarkan Eks. Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan, pengaduan tertinggi di Provinsi Aceh sebanyak 25 kasus (37,4%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara tidak ada kasus (0%).

## 6) Isi Pengaduan Terbanyak

Pengelolaan pengaduan pada bulan Januari 2017 yang mencapai 716 pengaduan, apabila dilihat dari isi pengaduan dari segi kategori, derajat maupun sumber pengaduan, maka diperoleh 5 topik pengaduan terbanyak yaitu :

- 1) Penyusunan&DokumenPerencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM, sebesar 21,2 %.
- 2) PelaksanaanKegiatan PPMK; P2B; RLF/Dana Bergulir, sebesar7,5 %.
- 3) PelaksanaanKegiatanInfrastrukturSkalaLingkungan/PLPBK Lanjutan, sebesar 7,1%.
- 4) PelaksanaanSosialisasiAwal (Kel/Desa, Kab/Kota,Provinsi), sebesar6,8%.
- 5) IntegrasiPerencanaan RPLP/RTPLP kedalam RPJM Desasebesar 5,2%.